

Editor: Dr. Fitra Arsil, SH., MH.

pi



Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?

Ariesy Tri Mauleny, Hilma Meilani,
Dewi Wuryandani, Lisnawati, Fitra Arsil

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor

Dr. Fitra Arsil, SH., MH.

IBU KOTA NUSANTARA: STRATEGI MENUJU INDONESIA BARU?

Ariesy Tri Mauleny
Hilma Meilani
Dewi Wuryandani
Lisnawati
Fitra Arsil

Publica Indonesia Utama
2022

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru? / Ariesy Tri Mauleny, Hilma Meilani, Dewi Wuryandani, Lisnawati, Fitra Arsil | Ed. 1; Cet. 1.-Jakarta: Publica Indonesia Utama - 2022

xxvi + 179 Hlm; 14,8 X 21 cm

ISBN: 978-623-8232-05-5

Cetakan Pertama, Desember 2022

Judul:

Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?

Penulis : Ariesy Tri Mauleny, Hilma Meilani, Dewi Wuryandani,
Lisnawati, Fitra Arsil
Editor : Dr. Fitra Arsil, SH., MH.
Penata halaman : Tim Kreatif Publica Institute
Desain Cover : Tim Vanga Kreatif

copyrights © 2022

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No 18, Kel. Kebagusan, Kec. Pasar
Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kebijakan pemindahan ibu kota negara (IKN) tentunya tidak lahir begitu saja, tetapi berangkat dari ragam pemikiran mendalam. Pemikiran yang bahkan telah menjadi narasi para pemimpin negeri sebelumnya. Hal tersebut semakin menguat sejalan dengan perkembangan kondisi Indonesia pada umumnya dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai ibu kota saat ini khususnya.

Hadirnya buku dengan judul **“Ibu Kota Negara Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”** ini sangat tepat di tengah semakin berkembangnya diskusi mengenai pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Saya menilai buku ini menarik mengingat pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara merupakan salah satu program utama yang menjadi *output* bersama DPR dan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulaidaridiskursuskonseptualmengenaiurgensipembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, termasuk bagaimana sejarah pemindahan IKN yang telah berlangsung lama dengan alasan dan pertimbangannya. Selanjutnya dihadirkan *benchmarking* pemindahan IKN dari perspektif negara lain yaitu Brasil, Malaysia, Tanzania dan Korea Selatan termasuk skema pembiayaannya. Yang menarik juga terdapat pembahasan terkait bagaimana upaya yang dapat dibangun untuk menghadirkan IKN Nusantara sebagai pusat

ekonomi baru yang menggeser Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Disamping itu, buku ini juga melihat pentingnya memahami perjalanan penyusunan dan pembahasan RUU hingga menjadi UU dan kemudian diuji Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya bermuara pada catatan untuk dilakukan perbaikan regulasi dan penguatan implementasi yang diperlukan. Buku ini juga membahas upaya pendanaan dan pembiayaan dengan beragam skema inovatif yang disediakan pemerintah untuk memastikan iklim investasi mendapatkan fleksibilitasnya namun tetap akuntabilitas di tengah dinamika global yang terjadi. Bagaimana menghadirkan IKN Nusantara sebagai *smart city* dan *smart society*, di saat yang sama DKI Jakarta juga diharapkan tetap tumbuh dan semakin produktif, di tengah kondisi yang ada saat ini.

Pada setiap tulisan, diuraikan secara jelas bagaimana analisis dilakukan terhadap hasil temuan dalam penelitian dan pengumpulan data kelompok yang telah dilakukan pada tahun 2022 dengan melibatkan daerah Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DI Yogyakarta, dengan melibatkan akademisi dan pemangku kepentingan di pusat dan daerah.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan selamat kepada para peneliti yang meski telah berganti nama menjadi Analis Legislatif, tetap dengan tekun dan inovatif dalam menghasilkan karya tulis ilmiah (KTI) yang bermanfaat dalam meningkatkan pemahaman para pembaca, khususnya dalam hal IKN Nusantara. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dr. Fitra Arsil, SH.,MH yang telah mencurahkan pikiran dan waktunya dalam *me-review* tema, *outline* KTI, dan kegiatan editorial lainnya, sehingga buku ini layak untuk

diterbitkan. Semoga invensi dan inovasi yang tersaji dalam buku ini bermanfaat bagi terciptanya Indonesia maju, berkelanjutan dan berdaya saing, Amin.

Jakarta, November 2022
Kepala Pusat Penelitian Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

DAFTAR ISI

Halaman sampul	iii
Halaman Balik Sampul	
Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii

Prolog

IKN Nusantara: Strategi menuju indonesia baru?	xv
<i>Fitra Arsil</i>	

Bagian Pertama

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur l	
<i>Ariesy Tri Mauleny dan Fitra Arsil</i>	

I. Pendahuluan.....	2
II. Ibu Kota Negara Indonesia dalam Sejarah.....	4
III. DKI Jakarta: Permasalahan dan Potensi.....	6
IV. Kalimantan Timur: Sebuah Pilihan.....	18
V. Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara	22
VI. Penutup	26
Daftar Pustaka	27

Bagian Kedua

Pemindahan Ibu Kota di Negara-Negara Lain dan Skema Pembiayaannya	29
<i>Hilma Meilani</i>	

I. Pendahuluan.....	30
II. Faktor-Faktor Pemilihan Lokasi Ibu Kota dan Pusat Pemerintahan.....	31
III. Beberapa Contoh Pemindahan Ibu Kota di Negara Lain.....	33
1. Pemindahan Ibu Kota Brasil (Brasilia).....	35
2. Pemindahan Ibu Kota Malaysia (Putrajaya).....	37

3. Pemindahan Ibu Kota Tanzania (Dodoma)	39
4. Pemindahan Ibu Kota Korea Selatan (Sejong)	41
IV. Skema Pembiayaan Pembangunan Ibu Kota	43
V. Penutup	50
Daftar Pustaka	52

Bagian Ketiga

Peluang dan Tantangan IKN Nusantara dalam Membentuk Pusat Ekonomi Baru	55
---	----

Dewi Wuryandani

I. Pendahuluan	56
II. IKN Nusantara sebagai Pusat Ekonomi Baru	58
III. Peluang dan Tantangan Pembentukan IKN Nusantara	63
IV. Penutup	68
Daftar Pustaka	70

Bagian Keempat

Skema Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara	73
---	----

Ariesy Tri Mauleny

I. Pendahuluan	74
II. Skema Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara	77
III. Dampak Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara pada Kesinambungan Fiskal	87
IV. Dampak Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara pada Keberlanjutan Ekonomi	92
V. Penutup	101
Daftar Pustaka	103

Bagian Kelima

Smart City dan Smart Society IKN Nusantara bagi

Pembangunan Berkelanjutan	105
---------------------------------	-----

Ariesy Tri Mauleny

I. Pendahuluan	106
II. IKN Nusantara dan Pembangunan Berkelanjutan	107
III. <i>Smart City</i> dan <i>Smart Society</i>	109
IV. IKN Nusantara Bukan Sekedar Proyek Kawasan Strategis	113

V. Penutup	116
Daftar Pustaka	118
Bagian Keenam	
DKI Jakarta Setelah Pemindahan Ibu Kota Negara.....	121
<i>Lisnawati</i>	
I. Pendahuluan.....	122
II. Praktik, Kondisi, dan Permasalahan Provinsi DKI Jakarta sebagai IKN	123
III. Kondisi DKI Jakarta Setelah Tidak Menjadi Ibu Kota.....	128
IV. Prospek Ekonomi Jakarta Pasca IKN Nusantara	133
V. Penutup	136
Daftar Pustaka	137
Bagian Ketujuh	
Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara: Memastikan Demokrasi dan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Ibu Kota Baru	139
<i>Fitra Arsil</i>	
I. Pendahuluan.....	140
II. Mencari Alasan Pembahasan Terbaru	
III. Sinkronisasi antar Peraturan Perundang-Undangan Terkait.....	145
1. Implikasi Pengaturan Kawasan Strategis Nasional IKN	145
2. Implikasi Regulasi Akibat Ketiadaan DPRD	147
IV. Ruang Lebar Delegasi Pengaturan	148
1. Kekhususan Tanpa Undang-Undang.....	148
2. Perubahan Undang-Undang Tanpa Undang-Undang.....	150
3. Menebar <i>Blanco Mandaat</i> , Minim Mekanisme Kontrol ...	151
V. Regulasi di IKN dan Karakter Kelembagaan IKN	152
VI. Konsultasi sebagai Prosedur Pembentukan Kebijakan dan Peraturan	154
VII. Penutup	156
Daftar Pustaka	158

Epilog

Catatan Kritis Pembangunan dan Pengelolaan IKN

Nusantara.....161

Fitra Arsil

Indeks.....169

Biografi Editor.....174

Biografi Penulis.....176

DAFTAR TABEL

Bagian Pertama

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Tabel 1. Perpindahan Ibu Kota Negara Indonesia.....5

Tabel 2. Perkembangan Perekonomian DKI Jakarta berdasarkan Pengeluaran9

Tabel 3. Perkembangan Perekonomian DKI Jakarta Berdasarkan Lapangan Usaha11

Tabel 4. Perkembangan Kondisi Ketenagakerjaan15

Bagian Kedua

Pemindahan Ibu Kota di Negara-Negara Lain dan Skema

Pembiayaannya

Tabel 1. Negara yang Memindahkan Ibu Kota dalam 100 Tahun Terakhir33

Tabel 2. Pemindahan Ibu Kota di Brasil, Malaysia, dan Tanzania44

Bagian Ketiga

Peluang dan Tantangan IKN Nusantara dalam Membentuk

Pusat Ekonomi Baru

Tabel 1. Populasi Jakarta, Indonesia Bersama 4 Kota Besar Lainnya58

Bagian Keempat

Skema Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara

Tabel 1. Skema Pendanaan/Pembiayaan IKN dalam RUU IKN dan Lampirannya.....83

Tabel 2. Strategi Pendanaan/Pembiayaan IKN.....85

Bagian Kelima

Smart City dan *Smart Society* IKN Nusantara bagi

Pembangunan Berkelanjutan

Tabel 1. Perkembangan Penduduk dan Luas Wilayah DKI Jakarta126

DAFTAR GAMBAR

Bagian Pertama

Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur

Gambar 1. Realisasi Investasi Indonesia Berdasarkan Provinsi 14

Gambar 2. Karakteristik Pendukung Kalimantan Timur sebagai
IKN 19

Gambar 3. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Provinsi di
Kalimantan 20

Gambar 4. Kontribusi PDB Provinsi terhadap PDB Indonesia 22

Gambar 5. Visi Ibu Kota Negara 24

Bagian Ketiga

Peluang dan Tantangan IKN Nusantara dalam Membentuk Pusat Ekonomi Baru

Gambar 1. Lokasi Calon Ibu Kota Baru 62

Bagian Keempat

Skema Pendanaan/Pembiayaan IKN Nusantara

Gambar 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut Pulau
(2021) 80

Gambar 2. Dampak Pembangunan IKN pada Kesenambungan Fiskal
88

Gambar 3. Kerangka Konseptual Kebijakan Fiskal 92

Gambar 4. Kerangka Triangular IKN-Balikpapan-Samarinda 93

Gambar 5. Tahapan Pembangunan dan Pengembangan IKN
Nusantara 95

Gambar 6. Permasalahan Utama APBN di Masa Pandemi 97

Bagian Kelima

Smart City dan *Smart Society* IKN Nusantara bagi Pembangunan Berkelanjutan

Gambar 1. Alokasi Pendanaan IKN Nusantara dan Proyek
Strategis Lainnya Tahun 2022 115

Bagian Keenam

DKI Jakarta Setelah Pemindahan Ibu Kota Negara

Gambar 1. Kontribusi dan Pertumbuhan Ekonomi menurut
Pulau (2021)130

Prolog

IKN NUSANTARA: STRATEGI MENUJU INDONESIA BARU?

Fitra Arsil

Pendahuluan

Pilihan memindahkan IKN, bukan hanya muncul dalam periode kepemimpinan hari ini. Sebelumnya telah digagas oleh Presiden Soekarno pada tahun 1957 untuk memindahkan IKN ke Palangka Raya. Kemudian tahun 1997, Presiden Soeharto juga menyatakan untuk membentuk Kawasan Jonggol sebagai pusat pemerintahan melalui Keppres Nomor 1 Tahun 1997.¹ Dilanjut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyodorkan skenario untuk mempertahankan dan memperbaiki Jakarta sebagai ibu kota atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta. Artinya pemikiran untuk memindahkan ibu kota sudah menjadi narasi pemimpin negeri.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur pada hakekatnya adalah agar setiap pemerintahan di masa mendatang bisa melangkah konsisten dan terhindar dari berbagai paradoks dalam mencapai cita-cita bangsa yang ingin mewujudkan Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan dengan perekonomian yang tumbuh berkelanjutan.

Untuk mencapai Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju dimana ekonomi Indonesia diharapkan masuk lima besar dunia pada tahun 2045 dibutuhkan transformasi ekonomi. Artinya

1 Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Bappenas. Juli 2021

pada tahun 2036, Indonesia seharusnya sudah keluar dari *middle income trap* dengan PDB per kapita sebesar US\$23.119, salah satunya melalui hilirisasi industri dengan memanfaatkan SDM, infrastruktur, penyederhanaan birokrasi dan pemindahan IKN yang mendukung transformasi ekonomi tersebut.²

IKN Nusantara harus dapat mendorong tahapan perubahan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selama ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi pusat segalanya (pemerintahan, politik, perdagangan, investasi, teknologi, SDM, dan sebagainya), tidak mengherankan ketika perputaran uang 70 persen berada di Jakarta yang luasnya hanya 661,23 km² atau 0,003 persen dari total luas daratan Indonesia yang mencapai 1.919.440 km². Sementara jika dilihat dari jumlah penduduk sebanyak 11,25 juta jiwa atau 3,9 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 270,20 juta jiwa.³

Kondisi objektif Jakarta dipandang sudah tidak cocok lagi sebagai IKN karena beragam permasalahan ikutan sejalan dengan kapasitasnya sebagai ibu kota yang sekaligus kota megapolitan. Terlihat dari beban yang dialami Jakarta diantaranya: *pertama*, kepadatan penduduk 16.704 jiwa/km² sementara kepadatan penduduk Indonesia hanya 141 jiwa/km². Kemacetan Jakarta yang merupakan kota termacet nomor 10 di dunia pada tahun 2019 dan menurun menjadi nomor 31 dari 416 kota besar di 57 negara tahun 2020 (saat pandemi Covid-19).

Belum lagi permasalahan lingkungan dan geologi yang telah akut antara lain banjir yang setiap tahun melanda Jakarta dan terjadinya penurunan tanah yang mengakibatkan sebagian wilayah Jakarta berada di bawah permukaan laut. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur pada hakekatnya memberikan ruang

2 Djkn, (2022). "Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenukeu.go.id/Kanwil-Kalbar/Baca-Artikel/14671/Urgensi-Pemindahan-Ibu-Kota-Negara.Html>, Diakses 7 Desember 2022.

3 *Ibid.*

bagi Jakarta untuk membenahi diri dan mengeluarkan beban dan permasalahan Jakarta. Sekaligus pada saat yang bersamaan membuka proses transformasi ekonomi yang berpotensi mentransfer Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Melihat kondisi saat ini dan kecenderungan ke depan, meskipun dilakukan penataan besar-besaran, DKI Jakarta akan semakin kesulitan membenahi dan terus memikul tanggung jawab sebagai Ibu Kota Negara. Jakarta dengan bebannya saat ini dimana kepadatan penduduk DKI Jakarta per Juni 2022 mencapai 17.013 jiwa/km persegi, meningkat signifikan dari tahun 2021 yang mencapai 15.978 jiwa/km persegi. Sangat jauh jika dibandingkan dengan Jawa Barat sebagai provinsi terpadat kedua yaitu 1.379 jiwa/km² dan Banten sebagai terpadat berikutnya yang hanya 1.248 jiwa/km². Apalagi jika dibandingkan dengan Bali yang hanya 755 jiwa/km² atau Nusa Tenggara Barat 290 jiwa/km².⁴ Hal ini bukan saja menyebabkan kemacetan, tetapi juga penurunan kualitas tanah, air, dan udara serta penurunan permukaan air laut.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2021 telah terjadi 72 kejadian banjir, 53 jalan tergenang, 12 kejadian tanah longsor, 236 kejadian pohon tumbang dan 536 kejadian kebakaran. Sementara tahun 2020 mencatat 101 kejadian banjir, 2 kejadian angin kencang, 17 kejadian tanah longsor, 123 kejadian pohon tumbang, dan 543 kejadian kebakaran. Kondisi tahunan DKI Jakarta tersebut, akan terus meningkat secara kumulatif jika tidak segera ditanggulangi. Belum lagi pergerakan segmen Mentawai Megathrust yang sudah berada pada masa 'jatuh tempo' atau Megathrust Selat Sunda yang berpotensi tsunami di selatan Pulau Jawa termasuk pantai

4 Jakarta, Provinsi Paling Padat Di Indonesia, <https://DataIndonesia.Id/Ragam/Detail/Jakarta-Provinsi-Paling-Padat-Di-Indonesia>, Diakses 7 Desember 2022.

barat Sumatera hingga ke Nusa Tenggara Timur.⁵ Kondisi ini semakin menambah kerawanan Pulau Jawa sebagai lokasi keberadaan ibu kota negara yang tidak mungkin dibiarkan lumpuh ketika ancaman itu datang. Belum lagi ketika dikaitkan dengan kesenjangan pembangunan antarwilayah khususnya jika membandingkan antara Jakarta atau pulau Jawa dengan pulau lainnya sangat terasa bagaimana posisi ibu kota negara mendorong terbentuknya jawa sentris.⁶

Pro kontra pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara tidak lagi berada pada tataran apakah perlu dilakukan atau tidak, tetapi mulai bergeser pada pembahasan kontekstual dan substansial, mengenai tahapan regulasi yang dibentuk dan sejauh mana pengaturannya serta bagaimana regulasi yang ada dapat diimplementasikan. Bagaimana regulasi turunan dan apakah otorita yang terbentuk sejalan dengan kelembagaan yang ada, menjadi salah satu faktor penting yang harus dipersiapkan untuk mewujudkan IKN Nusantara. Jangan sampai IKN Nusantara membuka kerancuan hukum dalam legalitas, legitimasi dan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, serta sejauh mana proses *checks and balances* dapat dipertahankan.

Kita juga tidak boleh menutup mata dengan beragam pandangan yang disampaikan mulai dari pengamat sampai dengan akademisi terkait keberlanjutan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Beberapa mengkhawatirkan IKN Nusantara menjadi proyek mangkrak atau kota mati jika tidak diantisipasi sejak awal.

Salah satu hal yang perlu menjadi catatan dalam buku bunga rampai ini yakni hasil yang diungkapkan tidak saja berdasarkan studi empiris, melainkan juga berbasis pada

5 Pnbp, (2022), Refleksi Tsunami 1979, <https://Bnbp.Go.Id/Berita/Refleksi-Tsunami-1797>, Diakses 7 Desember 2022.

6 Shalih, O. Et Al, (2018), Kebencanaan, *Jurnal Academia Praja*, Volume 1 Tahun 2018.

pengumpulan data primer baik melalui *focus group discussion* (FGD) dengan para akademisi/praktisi di pusat maupun di daerah serta bersumber dari pemangku kepentingan. Singkatnya, buku bunga rampai yang berbasis penelitian ini perlu untuk dibaca tidak saja oleh para peneliti, akademisi, praktisi dan masyarakat melainkan juga oleh para pengambil keputusan serta berbagai pihak lainnya terkait pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.

Uraian Isi Buku

Buku bunga rampai ini disusun dalam 7 Bagian. Diawali dengan prolog yang menjelaskan tentang latar belakang, urgensi dari penulisan buku ini serta bagaimana uraian buku ini disusun. Bagian Pertama ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny dan Fitra Arsil. Dalam bagian ini diuraikan tentang bagaimana sejarah pemindahan ibu kota yang pernah terjadi dan pertimbangan apa yang mendasarinya. Dijelaskan pula bagaimana kondisi perekonomian dan ketimpangan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan Jakarta secara khusus dengan segala permasalahan dan potensinya. Beragamnya potensi bencana yang rawan terjadi di Jakarta, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, pergerakan tanah, hingga banjir. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan oleh posisi Jakarta berada di wilayah yang dipengaruhi oleh tiga zona patahan yaitu patahan baribis, patahan kendang dan Indo-Australia yang terletak di selatan Pulau Jawa.⁷

Selain gempa, potensi bencana lainnya adalah gunung api. Belum lagi fenomena pergerakan tanah berupa penurunan permukaan tanah dan potensi megathrust yang masih

7 “Waspada! Ini Sederet Bencana Berpotensi Terjadi Di Jakarta”, <https://Megapolitan.Okezone.Com/Read/2019/12/29/338/2147088/Waspada-Ini-Sederet-Bencana-Berpotensi-Terjadi-Di-Jakarta>, Diakses 7 Desember 2022.

mengancam. Rasanya tidak bijak mempertaruhkan Jakarta sebagai ibu kota negara di tengah beragam potensi bencana dan tantangan yang ada. Kesulitan melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap bencana karena kepadatan penduduk dan beragam persoalan lainnya, harus segera dicarikan solusinya. Yang terpenting dan pertama harus dilakukan adalah bagaimana menormalisasi perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang optimal. Kondisi diatas kemudian melatarbelakangi bagaimana urgensi pemindahan ibu kota negara harus dilakukan.

Bagian Kedua, Hilma Meilani, menulis tentang Gagasan untuk memindahkan ibu kota negara merupakan hal lumrah karena banyak negara melakukan hal tersebut. Setidaknya dalam kurun waktu 100 tahun ini terdapat setidaknya 30 negara yang memindahkan ibu kota negaranya. Banyak yang sukses namun tidak sedikit yang gagal, sehingga dengan adanya risiko kegagalan tersebut diperlukan langkah hati-hati dan pertimbangan yang matang dalam pemindahan ibu kota negara. Bagian kedua ini juga dilengkapi dengan bagaimana kondisi beberapa negara yang telah memindahkan ibu kotanya seperti Brasil (dari Rio de Janeiro ke Brasilia), Malaysia (dari Kuala Lumpur ke Putrajaya), Tanzania (dari Dar es Salaam ke Dodoma), dan Korea Selatan (dari Seoul ke Sejong). Skema pembiayaan pemindahan ibu kota Brasil dan Tanzania menggunakan dana dari anggaran negara mereka, atau biasa disebut dengan skema tradisional, sedangkan Malaysia memilih untuk menggunakan lebih banyak skema PPP atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

Bagian Ketiga menyoroti tentang bagaimana peluang dan tantangan IKN Nusantara sebagai pusat ekonomi baru. Dalam tulisan Dewi Wuryandani ini dijelaskan bagaimana visi IKN Nusantara sebagai kota dunia untuk semua, kota berkelanjutan, penggerak ekonomi Indonesia di masa depan, dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan

keberagaman bangsa Indonesia, Dalam jangka panjang, IKN Nusantara diharapkan dapat berperan sebagai *economic super hub* dan *economic value chain* nasional. IKN Nusantara dijadikan sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa *multiflier effect* dengan menjadikan episentrum pertumbuhan sehingga dapat merata ke wilayah luar Jawa guna mendukung pembangunan Indonesia Sentris menuju Indonesia Maju 2045.

Sementara itu pada bagian keempat didiskusikan mengenai skema pendanaan/pembiayaan IKN Nusantara. Ariesy Tri Mauleny membagi penjelasannya dalam empat bagian. Pertama terkait dengan latar belakang bagaimana kebijakan perencanaan, pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara ini harus dilakukan dan bagaimana faktor pembiayaan menjadi hal yang paling penting untuk dibahas. Kedua, dijelaskan skema pendanaan/pembiayaan IKN Nusantara yang terdapat dalam UU IKN dan Lampiran Rencana Induknya. Ketiga diuraikan dampak pendanaan/pembiayaan IKN Nusantara pada kesinambungan fiskal. Keempat, disoroti dampak pendanaan/pembiayaan pada keberlanjutan ekonomi.

Bagian kelima ditulis bersama oleh Ariesy Tri Mauleny dan Fitra Arsil. Keduanya menyoroti tentang *smart city* dan *smart society* IKN Nusantara bagi pembangunan berkelanjutan. Mengawali diskusinya terkait smart city dan smart society, diikuti dengan IKN Nusantara dan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini memberikan penekanan pada pemanfaatan transformasi dan inovasi teknologi yang dapat membantu kehidupan sehari-hari di IKN Nusantara menjadi agenda strategis yang harus diwujudkan. Mulai dari sistem transportasi cerdas, system manajemen Gedung cerdas, energi cerdas, kendaraan tanpa awak cerdas, dan pertukaran data secara elektronik. Membangun ekosistem yang menjamin kemudahan hidup, bekerja, dan belajar dengan mengurangi *digital divide*.

Membangun IKN Nusantara sebagai kota yang mengadopsi teknologi mulai dari perencanaan maupun pembangunan kota, hingga menjalankan fungsi pemerintahan dan pengelolaan kota atau kota cerdas dihadirkan di IKN Nusantara. Pengembangan kota cerdas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di IKN Nusantara sehingga dapat melahirkan SDM unggul dan berdaya saing. Setidaknya ada enam sektor yang akan menggunakan teknologi modern dalam penerapannya yaitu sistem pemerintahan, transportasi dan logistik, kehidupan masyarakat, sumber daya energi, sumber daya manusia, industri dan infrastruktur.

Tulisan keenam disusun oleh Lisnawati yang menyoroti bagaimana DKI Jakarta setelah pemindahan Ibu Kota Negara. Dalam pembahasannya, disoroti bagaimana praktik kondisi, dan permasalahan provinsi DKI Jakarta sebagai IKN. Dilanjutkan dengan gambaran ketika DKI Jakarta setelah tidak menjadi Ibu Kota Negara. Tulisan diakhiri dengan memberikan penekanan pada prospek ekonomi Jakarta pasca IKN Nusantara, dimana Pemindahan Ibu Kota Negara akan berdampak terhadap perekonomian Jakarta. Hasil perhitungan BPS Provinsi DKI Jakarta (2019) menunjukkan konsekuensi umum ekonomi pemindahan ibu kota adalah berkurangnya nilai PDRB DKI Jakarta. Dampak total nilai tambah yang akan berkurang sekitar Rp340 triliun atau sekitar 16-23% dari total PDRB. Hal ini merupakan dampak langsung sektor pemerintah yaitu kemungkinan berkurangnya nilai PDRB sekitar Rp280 triliun (10- 13% terhadap total PDRB). Hal ini karena kontribusi belanja pemerintah pusat (APBN) terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada PDRB DKI Jakarta sebesar 80-90%. Dampak langsung pada sektor investasi (PMTB) yaitu kemungkinan nilai PDRB berkurang sekitar Rp60 triliun atau sekitar 2-5% terhadap nilai PDRB. Selain itu juga, penurunan permintaan oleh institusi pemerintah dan

PMTB akan mengurangi output dan nilai tambah dari sisi lapangan usaha. Konsumsi rumah tangga juga akan berkurang dengan berpindahnya ASN dan keluarganya. Artinya dengan berkurangnya *final demand* akibat perpindahan IKN maka perdagangan antar provinsi juga akan ikut berkurang. Dampak perpindahan IKN, juga akan menurunkan permintaan akhir yang berdampak pada lapangan usaha (*supply*). Untuk menjaga pertumbuhan perlu menjaga pertumbuhan sektor- sektor utama pendukung ekonomi dan mengembangkan sektor-sektor potensial yang ada.

Terakhir, bagian ketujuh yang ditulis oleh Fitra Arsil merupakan catatan kritis yang patut menjadi perhatian para pihak. Tinjauan yang dilakukan penulis terhadap regulasi seputar pemindahan ibukota, khususnya mengenai sistem pemerintahan dan perangkat dalam penyelenggaraan IKN, menghasilkan rekomendasi untuk melakukan banyak perbaikan dalam pengaturannya. Gagasan pemindahan ibukota yang boleh jadi memang merupakan kebutuhan dan didukung oleh banyak pihak perlu didukung dengan regulasi yang teliti, komprehensif dan sinkron dengan pengaturan di berbagai sektor terkait. Proses pembentukan UU IKN dan penyederhanaan mekanisme pengawasan dalam penyelenggaraan IKN nampak berkontribusi terhadap regulasi IKN yang digambarkan dalam tulisannya. UU IKN yang berlaku saat ini memerlukan revisi-revisi agar gagasan pemindahan ibukota bukan saja memiliki dukungan finansial, infrastruktur dan kebutuhan materiil lainnya namun juga perangkat peraturan perundang-undangan yang memadai sehingga penyelenggaraan dapat memenuhi tata kelola yang baik dan konstitusionalitasnya lebih terjaga

Akhirnya, sebagai epilog dari buku ini dijelaskan antara lain bahwa kebijakan nasional perencanaan, pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara, belum bisa dilakukan segera tanpa memperbaiki dan menyempurnakan beberapa hal yang

terkait dengan regulasi UU IKN itu sendiri dikaitkan dengan peraturan pelaksanaan yang menghubungkan dengan aktivitas lanjutan di level sektor dan daerah. Kebijakan perencanaan, pembangunan dan pemindahan juga membutuhkan beragam aktivitas wajib dan pelengkap yang harus disiapkan seluruh *stakeholders* yang ada. Karena jika hal tersebut tidak terjadi, maka tahapan proses menuju IKN Nusantara akan terhambat. Dengan kata lain, upaya meningkatkan kinerja iklim investasi dan kemudahan berusaha tidak dapat digeneralisir. Perbaikan *mindset* tentang bagaimana pembangunan dan pemindahan Nusantara untuk tetap fokus pada kiprahnya secara inklusif dan berdaya saing harus diutamakan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Terdapat setidaknya empat kondisi yang dapat diperkirakan sebagai akhir dari IKN Nusantara, sehingga perlu kehati-hatian dalam melangkah. Meski Otorita Ibu Kota Nusantara sudah terbentuk, bukan berarti mengabaikan ragam perbaikan dan penyesuaian mulai dari tataran regulasi hingga konstruksi pembiayaan dan tahapan pembangunan yang akan dilakukan sebagaimana direkomendasikan dalam buku ini. Empat kondisi tersebut adalah: *Pertama*, seluruh tahapan proses dapat berjalan sesuai dengan skenario yang dipersiapkan pemerintah dan DPR, sampai dengan IKN Nusantara mewujudkan dalam pembangunan Indonesia sentris yang diharapkan. Hal ini tentunya membutuhkan beragam prasyarat kondisi utama dan pelengkap yang tidak dapat ditinggalkan sedikitpun implementasinya dengan didukung keyakinan dan keinginan semua pihak termasuk pemerintahan yang terbentuk pasca pemilu 2024.

Kedua, pembangunan IKN Nusantara hanya sampai dengan pembangunan istana negara dan pelaksanaan perayaan 17 Agustus 2024 di lapangan IKN Nusantara karena tidak mendapat kepercayaan dan dukungan dari pemerintahan

yang terbentuk pasca pemilu 2024. *Ketiga*, kebijakan IKN Nusantara hanya menjadi tambahan proyek mangkrak yang terjadi karena kesulitan pendanaan/pembiayaan sejak tahap awal. Dan terakhir *Keempat*, kebijakan IKN Nusantara hanya terwujud dalam tataran regulasi dan tidak pernah benar-benar dapat diimplementasikan. Tentu bukan itu yang kita inginkan. Oleh karena itu, semua sektor, daerah dan seluruh pemangku kepentingan harus sejalan seiringan dalam mengatasi kendala dan tantangan yang ada. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana IKN Nusantara benar-benar dapat mewujudkan pemerataan pembangunan yang berprinsip pada Indonesia sentris yang semakin maju dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Saku Pemindahan Ibu Kota Negara, Bappenas. Juli 2021
- Djkn, (2022). "Pemindahan Ibu Kota Negara", <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-kalbar/baca-artikel/14671/urgensi-pemindahan-ibu-kota-negara.html>, Diakses 7 Desember 2022.
- Jakarta, Provinsi Paling Padat Di Indonesia, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/jakarta-provinsi-paling-padat-di-indonesia>, Diakses 7 Desember 2022.
- Pnbp, (2022), Refleksi Tsunami 1979, <https://bnpb.go.id/berita/refleksi-tsunami-1797>, Diakses 7 Desember 2022.
- Shalih, O. Et Al, (2018), Kebencanaan, *Jurnal Academia Praja*, Volume 1 Tahun 2018.
- "Waspada! Ini Sederet Bencana Berpotensi Terjadi Di Jakarta", <https://megapolitan.okezone.com/read/2019/12/29/338/2147088/waspada-ini-sederet-bencana-berpotensi-terjadi-di-jakarta>, Diakses 7 Desember 2022.

Epilog

CATATAN KRITIS PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN IKN NUSANTARA

Fitra Arsil

Presiden Jokowi telah mengumumkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini harus direncanakan dengan matang karena terdapat potensi dampak positif beserta risiko. Latar belakang pemindahan IKN adalah beban DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan pusat bisnis sudah terlampau tinggi. Pemindahan IKN juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Oleh karena itu tulisan ini akan menganalisis dampak ekonomi beserta risiko pemindahan IKN yang harus diantisipasi pemerintah.

Dalam aspek ekonomi, terdapat potensi peningkatan PDB disertai dengan tingkat inflasi yang terkendali. Namun demikian terdapat risiko pembiayaan yang bersumber dari APBN, BUMN, badan usaha, dan pihak swasta. Pemerintah harus memperhatikan skema kerja sama dengan pihak tersebut mengingat pembangunan sebuah 'kota baru' beserta infrastrukturnya memiliki risiko yang tinggi. Selain itu terdapat potensi inflasi lebih dari perkiraan yang bersumber dari kenaikan harga lahan. DPR RI memantau perkembangan rencana pemindahan IKN melalui mekanisme fungsi pengawasan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih terus berjalan hingga saat ini terus mendapat perhatian publik, tidak hanya publik di Indonesia, namun juga di belahan negara lainnya. Salah satu hal yang menarik dari IKN Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur adalah penerapan

konsep *smart city* modern yang digadang-gadang akan berbeda dengan penerapan *smart city* yang telah diterapkan di kota-kota lain di Indonesia dan negara lainnya.

Konsep *intelligent city* sebagai wujud pengembangan dari konsep *smart city*, mendorong percepatan modernisasi kota melalui pemanfaatan teknologi sebagai dasar pengembangan konsep ini. Peran teknologi inilah yang akan menjadi kunci keberhasilan dari penyelenggaraan konsep *intelligent city*. Didukung dengan peran dalam mentransformasikan komunitas yang lebih kreatif dan aktif dalam berbagai proyek pengembangan *smart community*, dapat mendorong terciptanya kota yang saling terkoneksi dengan peran teknologi di dalamnya.

Bagi berbagai negara dan kota pintar lain di dunia, konsep *intelligent city* berhasil meningkatkan kualitas hidup sumber daya dan masyarakatnya. Beberapa kota dari negara lain yang telah menerapkan konsep ini diantaranya ada Sejong di Korea Selatan, Putrajaya di Malaysia dan beberapa kota lainnya. Bagi pemerintah, penerapan konsep *intelligent city* di IKN Nusantara tidak hanya dilakukan sebagai upaya dalam mensejajarkan IKN Nusantara dengan ibu kota lain yang telah mengusung konsep serupa, melainkan pula diharapkan dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mengembangkan konsep *intelligent city* sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya juga kelestarian lingkungan.

Meskipun mengusung konsep modern, pembangunan IKN Nusantara yang dilakukan di atas lahan seluas 256.000 hektare tersebut tidak menghilangkan kearifan lokal Kalimantan Timur serta esensi dari *forest city* atau kota hutan. Dalam sebuah wawancara, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal Pol Budi Gunawan, menegaskan pembangunan IKN Nusantara tidak akan berdampak negatif pada ekosistem di Kalimantan Timur, khususnya bagi teluk Balikpapan dengan terus berupaya

memitigasi dampak negatif lingkungan dengan baik.

Saat ini pemerintah sedang berupaya melakukan percepatan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN Nusantara. Pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan kekhususan atas metode pemilihan, jenis kontrak, pemberdayaan pelaku usaha lokal, serta penggunaan tenaga kerja dan material lokal. Beberapa hal khusus yang menjadi pendorong dan pemercepat adalah *e-purchasing* untuk pengadaan jasa konsultasi, penunjukkan langsung dalam rangka permintaan berulang untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, seleksi cepat, tender terbatas, seleksi terbatas melalui panel konsultasi, atau *beauty contest*. Dimana seluruhnya memperhatikan kontrak tahun jamak yang lingkup penyelesaian pekerjaan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 30 (tiga puluh) tahun anggaran.¹⁶

Pilihan tersebut sejatinya memberikan dorongan bagi setiap pemerintahan yang terbentuk untuk terus melanjutkan kebijakan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara. Namun demikian, memiliki peluang terwujudnya komitmen pengadaan barang dan jasa dalam kurun waktu yang panjang, tentulah tidak mudah. Terlebih di masa ini dimana pasca pandemi Covid-19, dunia belum sepenuhnya pulih. Bahkan, ketegangan geopolitik yang terjadi, pastinya memicu beragam tantangan dinamika global lainnya. Hal tersebut dapat menjadi hambatan bagi upaya memperoleh investor bagi pembangunan IKN Nusantara.

Jika melihat kondisi dan tantangan di atas, maka masih wajarlah jika kemudian muncul kekhawatiran dalam mewujudkan tahapan tersebut. Sebagaimana di prediksi beberapa pengamat bahwa setidaknya ada empat kemungkinan dari kebijakan pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara yaitu: *Pertama*, kebijakan persiapan, pembangunan, dan

16 Peraturan Presiden tentang Otorita Ibu Kota Nusantara

pemindahan IKN Nusantara dapat berlangsung sepenuhnya dengan berbagai persyaratan kondisi yang harus dipenuhi. Dan pastinya harus tetap didukung oleh pemerintahan yang terbentuk setelahnya, karena kebijakan pemindahan IKN Nusantara adalah proyek besar *multi years*.

Dukungan investor dalam dan luar negeri mutlak dibutuhkan. Pemerintahan yang ada dan terbentuk setelahnya, harus terus memikirkan berbagai insentif yang dapat menarik minat investor, mulai dari skema pembiayaan, kemudahan perizinan sampai dengan keringanan pajak. Hal tersebut yang terus diyakinkan Presiden Joko Widodo kepada para pengusaha dan negara lain untuk berinvestasi di IKN Nusantara, bahwa ada jaminan keberlanjutan proyek IKN Nusantara, meski pemerintahan telah berganti. Termasuk pemberian *tax holiday* sampai dengan 30 tahun, *super tax deduction* untuk vokasi, pembangunan infrastruktur dan taman, bahkan perizinan hak guna bangunan (HGB) selama 80 tahun yang berpotensi diperpanjang hingga 160 tahun apabila masih dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kepentingan masyarakat IKN Nusantara.¹⁷

Apalagi jika *outcome* yang diharapkan sampai pada upaya meluaskan pembangunan ekonomi dari Jawa sentris menuju Indonesia sentris, dan bukan hanya turut membesarkan daerah penyangga. Pada kondisi tersebut, tentu sangat dibutuhkan IKN sebagai pusat *hub* nasional dan internasional dapat optimal dilaksanakan.

Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia, bahkan menyakini bahwa proyek senilai Rp466 triliun dapat terus berjalan meski perekonomian dunia diprediksi akan menghadapi resesi. Apalagi ketika pembangunan IKN tahap

17 "Insentif bagi investasi di ibu kota baru", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd17vpr8kjo>, diakses 7 Desember 2022.

pertama yang sudah dimulai dan dibiayai oleh APBN melalui penghematan dan *recofusing*, benar selesai pada 2024, maka akan semakin dapat memicu minat investor untuk terlibat dalam beragam pembiayaan lain yang ditawarkan dalam rangka menghidupkan Kawasan IKN Nusantara secara keseluruhan.

Kedua, sejumlah pengamat ekonomi masih skeptis pembangunan IKN akan memberikan dampak signifikan pada ekonomi nasional. Megaproyek IKN juga dikhawatirkan hanya menambah beban keuangan negara. Pemerintah pun dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena dikhawatirkan belum tentu ke depannya swasta apalagi asing akan tertarik. Apalagi jika dikaitkan dengan prediksi IMF mengenai perlambatan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik dan tingginya harga-harga komoditas kebutuhan dasar, yang akhirnya berpotensi mendorong investor untuk berinvestasi di aset dan sektor yang aman.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas berupaya menyakinkan bahwa pembangunan IKN Nusantara tidak akan memberatkan APBN dan Pemerintah akan menghindari pembiayaan utang jangka panjang. Selain itu juga, pemerintah menyakini pembangunan IKN justru akan menambah aset negara.¹⁸ Anggapan negatif spekulasi masyarakat dan kenyakinan positif pemerintah hanya bisa dibuktikan dalam perjalanan tahap pertama (2022-2024) yang dianggap paling kritis karena menjadi landasan dalam tahapan pembangunan selanjutnya seperti infrastruktur jalan dan pelabuhan.¹⁹

Belum lagi jika dikaitkan dengan kekhawatiran Otorita

18 "Tbu Kota Nusantara: Penggunaan APBN untuk pembangunan IKN, pakar sebut akan korbakan program masyarakat", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>, diakses 7 Desember 2022.

19 "Anggaran IKN masuk program pemulihan ekonomi", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60021821>, diakses 7 Desember 2022.

IKN Nusantara akan melahirkan kekuasaan pemerintahan yang sewenang-wenang dan tidak demokratis, tanpa adanya gubernur dan DPRD. Bentuk otorita di IKN Nusantara memungkinkan terjadinya otoritarianisme di tingkat lokal karena hanya dikendalikan oleh eksekutif, dan tidak ada representasi dari masyarakat melalui DPRD. Ketika kemudian, DPR RI akan difungsikan sebagai mitra pemerintahan otorita IKN Nusantara seperti menghadirkan kemitraan dengan 'kementerian baru', perlu ada kejelasan yang mengatur kekhususan IKN dan mekanismenya, sehingga tidak ambigu dan inkonstitusional.²⁰

Lima alasan utama dipilihnya Kalimantan Timur sebagai sebagai IKN, adalah *pertama*, risiko bencana alam yang minimal, baik banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung merapi maupun tanah longsor; *kedua*, Lokasi yang strategis dan ada di tengah-tengah Indonesia; *ketiga*, lokasi yang berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang seperti Balikpapan dan Samarinda, *keempat*, infrastruktur yang relatif lengkap, serta *kelima*, tersedia lahan yang dikuasai pemerintah 180 ribu hektar. (kominfo, go.id, 2019).

Jika diamati lebih lanjut, kelima alasan di atas dirasakan berdasar pada alasan geografis, sehingga seharusnya tidak serta merta dapat dijadikan sebagai alasan dalam penunjukan IKN. Hal ini karena Kalimantan Timur merupakan provinsi yang memiliki potensi banjir yang tinggi. Selama ini sekitar 60,34 persen potensi banjir terjadi di provinsi Kalimantan Timur. Belum lagi potensi dari gempa dan tsunami yang disebabkan longsor bawah laut, dimana terdapat tiga titik sesar yakni Sesar Maratua, Sesar Mangkalihat, dan Sesar Paternostes (Mauleny, 2022b). Oleh karena itu, paling tidak diperlukan adanya perbandingan dari beberapa opsi daerah terkait aspek

20 "Ibu Kota Nusantara: Tanpa Gubernur dan DPRD, dikhawatirkan melahirkan kekuasaan yang sewenang-wenang dan tidak demokratis", <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-60055456>, diakses 7 Desember 2022.

geografis yang dijadikan penilaian dalam penunjukan IKN. Hal ini karena setiap daerah di Indonesia memiliki keunggulan aspek geografis yang berbeda dan tidak menutup kemungkinan juga memiliki keunggulan untuk dijadikan alternatif sebagai IKN.

Terkait aspek geografis (khususnya banjir dan kemacetan) di Jakarta yang juga dijadikan sebagai alasan utama dipindahkannya IKN ke Kalimantan Timur. Data menunjukkan bahwa sejak sebelum pandemi tingkat kemacetan di Jakarta sudah menurun 8 persen dan menduduki peringkat 10 dunia pada tahun 2019, turun 6 peringkat dibandingkan 2017 pada peringkat ke-4. Demikian pula dengan bencana banjir yang tercatat semakin berkurang. Luas wilayah tergenang paide berkurang 125 km² menjadi hanya 156 km² dari semula 281 km² pada 2015, dan 455 km² pada 2007.

Dari temuan-temuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan positif dan negatif, peluang dan tantangan, pendorong dan penghambat bagi terwujudnya pembangunan dan pemindahan IKN ke Kalimantan Timur harus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam menentukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan implementasi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah dan DPR sejalan dengan pemenuhan kesesuaian regulasi dan kelembagaan ke depan. Pentingnya penyelesaian pekerjaan rumah ini diyakini dapat membuat tahapan pembangunan dan pemindahan IKN ke depan lebih terarah dan terstruktur dengan tetap menjaga proses *checks and balances* antarlembaga. Selain itu, pengorbanan yang diberikan dalam mewujudkan pembangunan dan pemindahan IKN, harus terus diarahkan dalam upaya memberikan kemanfaatan tidak saja bagi perekonomian nasional, melainkan juga dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berdaya saing. Semoga.

INDEKS

A

administratif 23, 45, 123, 153, 159
aktivitas ekonomi 40, 124, 131
anggaran xx, 36, 38, 39, 40, 43,
44, 47, 49, 50, 51, 66, 84, 86,
101, 108, 132, 136, 163
apbn 43, 47, 49, 51, 62, 66, 77, 78,
84, 86, 87, 89, 94, 97, 101,
102, 131, 133, 161
aset 47, 91, 99, 100, 131, 132, 134,
136, 165

B

badan otorita 97, 164
balikpapan xiv, 20, 23, 60, 64, 82,
93, 96, 111, 162, 166
banjir xvi, xvii, xix, 3, 16, 17, 20,
25, 37, 38, 127, 128, 166,
167
bappenas xv, xxvi, 2, 4, 18, 26, 27,
30, 31, 56, 60, 70, 74, 83, 85,
88, 93, 95, 97, 103, 131, 137,
142, 158, 165
batas 89, 91
bencana xix, xx, 16, 17, 20, 27, 33,
60, 108, 122, 166, 167
berkelanjutan vii, xv, xvi, xx, xxi,
xxiv, 19, 23, 25, 26, 56, 63,
66, 67, 76, 78, 89, 100, 106,
107, 109, 122, 136, 142
bnpb 16
brasil v, xx, 34, 35, 36, 43, 44, 45,
50, 52, 86, 101
brasilia xx, 34, 35, 36, 43, 50

C

checks and balances xviii, 167

D

daerah khusus v, 2, 6, 26, 46, 82,
108, 123
dampak xxi, xxii, 8, 16, 18, 67,
98, 111, 127, 133, 136, 161,
163, 165
dampak ekonomi 18, 161
degradasi lingkungan 31
de jure 6
delegasi peraturan 150
demokrasi 8, 93, 147
digital xxi, 63, 107, 109, 112, 113,
117, 131
dki jakarta iv, v, vi, xii, xiii, xvii,
xxii, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16,
27, 59, 60, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128,
131, 132, 133, 136, 137,
142, 161
dodoma xx, 34, 35, 39, 40, 45, 50
domestik 8, 23, 74, 75, 76, 78, 93,
122, 128, 136
dpr ri vii, 27, 73, 74, 75, 94, 108,
129, 136, 143, 144, 158,
161, 166, 174, 175, 176

E

ekonomi 1, 8, 18, 27, 29, 55, 56,
58, 65, 66, 67, 70, 71, 75, 76,
80, 105, 121, 130, 133, 137,
174, 175, 176, 177
ekonomi inklusif 26, 101, 136
endowment 32

F

formal 15, 140

I

ibu kota i, iii, iv, v, xii, xiv, xv, xvi, xvii, xix, xxii, xxiv, xxvi, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 56, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 74, 75, 76, 82, 99, 100, 103, 107, 108, 109, 118, 121, 122, 123, 128, 131, 133, 137, 139, 140, 142, 144, 146, 149, 150, 154, 155, 158, 159, 161, 163, 165, 166, 167, 174

ibu kota negara v, xviii, xx, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18, 30, 36, 37, 50, 57, 59, 60, 67, 107, 123, 136, 142, 161

ikn v, vi, xii, xiv, xv, xvi, xviii, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, 2, 4, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167

ikn nusantara v, vi, xiv, xv, xvi, xviii, xx, xxi, xxii, xxiii, xxiv, xxv, 4, 6, 21, 55, 58, 61, 63, 65, 68, 69, 70, 73, 77, 87, 92,

95, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 133, 161, 162, 163, 164, 165, 166

indonesia baru i, iii, iv, v
indonesia sentris vi, xvii, xxi, 25, 26, 69
informal 15
intelligent city 110, 162

K

kalimantan v, vi, xiv, xv, xvi, 1, 3, 4, 6, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 45, 56, 57, 59, 60, 61, 65, 67, 76, 79, 82, 93, 96, 97, 103, 109, 110, 111, 115, 122, 123, 128, 129, 131, 161, 162, 166, 167

kalimantan timur v, vi, xiv, xv, xvi, 1, 3, 4, 6, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 45, 59, 60, 61, 67, 82, 93, 96, 97, 103, 110, 111, 115, 122, 123, 131, 161, 162, 166, 167

kawasan xv, 2, 6, 22, 23, 24, 26, 30, 32, 45, 52, 60, 71, 76, 107, 108, 109, 113, 128, 129, 145, 146, 165

kawasan industri 13
kawasan inti 64
kawasan pengembangan 21, 64
kebakaran xvii, 3, 20, 166
keberlanjutan ekonomi xxi, 78
kebijakan fiskal 77, 89, 92, 94
kekhususan 94, 124, 134, 148, 149, 151, 153, 156, 163, 166
kemacetan xvii, 3, 7, 38, 58, 126, 127, 128, 131, 167
kepadatan penduduk xvi, xvii, xx, 2, 17, 25, 31, 33, 35, 41, 126
kepala daerah 147

kerja sama 24, 47, 48, 49, 68, 100, 161
kesinambungan fiskal xxi, 47, 77, 87, 89, 102, 129
ketenagakerjaan xii, 15, 177
ketimpangan xix, 7, 58, 65, 80, 97, 161
keuangan 1, 4, 12, 29, 52, 55, 74, 92, 97, 99, 103, 105, 121, 125, 131, 174, 175, 176, 177
kewenangan 108, 134, 135, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 158
Konsumsi xxii, xxiii, 8, 9, 133
Korea Selatan v, xx, 34, 35, 41, 50, 87, 101, 110, 162
kota mitra 24
kpbu 47, 48, 49, 51, 53, 62, 84, 85, 86, 87, 99, 100, 101

L

lapangan usaha xxiii, 10, 124, 133
legislasi 136, 140, 141, 142, 145

M

magnet pertumbuhan 80, 101, 130, 136
mahkamah konstitusi vi, 75, 140, 145, 150, 155, 158
malaysia v, xii, xx, 34, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 51, 52, 57, 86, 101, 110, 162
megathrust xvii, 3, 128
middle income trap xvi, 24, 26
modern xxii, 36, 57, 61, 81, 106, 110, 111, 112, 117, 136, 162
modernisasi 110, 162
multiflier effect xxi, 69, 80, 101

N

negara v, xv, xvi, xvii, xix, xxvi, 1, 2, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 32, 33, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 66, 71, 74, 75, 76, 83, 107, 108, 111, 122, 123, 124, 128, 131, 133, 137, 139, 161, 162, 172, 174, 175

nota keuangan 52

nusantara v, xv, xvi, xix, xx, xxi, 4, 6, 21, 45, 46, 55, 56, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 87, 92, 95, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 122, 133, 161, 162

P

partisipasi publik 42, 151

pdrb xxii, 20, 95, 124, 133

peluang 55, 63

pembangunan 1, 18, 19, 23, 29, 31, 36, 37, 43, 46, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71, 75, 76, 80, 88, 95, 101, 105, 106, 107, 108, 109, 121, 122, 130, 136, 161, 175, 177

pembiayaan 43, 44, 49, 51, 73, 74, 76, 77, 83, 85, 87, 92

pemerintah vi, xxii, xxiv, 5, 7, 20, 22, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 56, 58, 60, 61, 64, 68, 74, 75, 76, 80, 84, 85, 86, 89, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 110, 113, 115, 116, 117, 122, 128, 130, 131, 132, 133, 136, 137, 143, 144, 147, 149, 153, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167

pemerintahan 5, 6, 31, 32, 46, 52, 82, 108, 112

pemerintahan daerah 7, 68, 94,

- 148, 151, 152
- pemerintahan darurat 5
- Pemilihan 18, 31, 155
- Pemindahan xii, xv, xvi, xxii, xxvi, 1, 2, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 44, 45, 52, 53, 56, 57, 60, 65, 67, 70, 103, 108, 121, 133, 137, 161
- pemindahan pusat pemerintahan 45
- pendanaan vi, xxi, xxv, 46, 47, 48, 62, 75, 76, 77, 82, 90, 91, 99, 100, 103, 115, 116, 117, 118
- Pengaturan 97, 140, 145, 146, 149, 154, 158, 173
- pengawasan xxiii, 136, 141, 151, 157, 161
- Pengeluaran xii, xxii, 8, 9, 133
- pengembangan 21, 23, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 63, 64, 76, 98, 110, 114, 118, 128, 134, 135, 149, 162
- perdagangan xvi, xxiii, 13, 23, 25, 37, 76, 78, 80, 81, 93, 95, 125, 128, 130, 133
- perekonomian xii, 9, 11, 27, 43, 103, 175, 177
- perencanaan xxi, xxii, xxiii, xxiv, 31, 39, 42, 43, 45, 46, 50, 51, 57, 69, 96, 98, 106, 111, 117
- perkantoran 13, 131, 132
- permasalahan Jakarta xvii, 17, 25, 26
- persiapan 46, 75, 82, 92, 108, 141, 149, 163
- perubahan iklim 16, 18, 26, 116, 117
- politik xvi, 6, 8, 20, 25, 31, 36, 40, 44, 50, 126, 155
- problematika 155
- program v, 35, 77, 84, 90, 94, 113, 142, 165
- program 7, 36, 174
- prospek xxii
- provinsi vi, xiv, xvii, xxii, xxvi, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 45, 52, 53, 59, 60, 61, 67, 96, 97, 103, 122, 123, 124, 133, 134, 137, 161
- proyek strategis nasional 7, 113, 116, 118
- pusat vii, 1, 29, 31, 32, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 70, 79, 105, 121, 132, 174, 176, 177
- pusat ekonomi baru v, xx, 56, 58, 68, 80
- pusat pemerintahan xv, 2, 4, 20, 26, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 50, 57, 59, 61, 123, 125, 161
- putrajaya xx, 34, 35, 37, 38, 39, 43, 50, 57, 110, 162
- putusan 75, 147, 156
- R**
- realisasi 13, 68
- regulasi vi, xviii, xxiii, xxiv, xxv, 99, 108, 141, 153, 154, 156, 157, 167
- revisi xxiii, 39, 140, 157
- risiko pemindahan IKN 161
- ruang fiskal 77, 79, 86, 87, 99, 101, 115
- S**
- samarinda xiv, 20, 23, 60, 82, 93, 96, 166
- sejong xx, 34, 35, 41, 42, 43, 50, 110, 162
- sektor xxii, xxiii, xxiv, xxv, 13, 15, 61, 63, 68, 77, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 94, 111, 112, 117, 118, 124, 125, 130, 132, 133, 134, 136, 141, 145,

156, 165
skema xii, xx, 29, 43, 44, 47, 48,
49, 50, 51, 53, 73, 74, 76, 77,
82, 83, 103
skema Pembiayaan 43, 44, 74, 76
smart city vi, xxi, 19, 56, 107, 110,
112, 113, 116, 117, 134, 162
smart society vi, xxi, 116, 117
strategi 45, 46, 67, 68, 69, 90, 96,
98, 99, 114
sumber daya xxii, 45, 48, 58, 67,
86, 91, 110, 111, 112, 117,
135, 162
swasta 38, 47, 48, 49, 62, 84, 85,
86, 87, 91, 99, 100, 101, 116,
117, 161, 164, 165
swasta 49, 51

T

tantangan xx, xxv, 8, 16, 17, 18,
26, 58, 74, 75, 76, 90, 93,
136, 163, 167
tanzania v, xx, 34, 35, 39, 40, 41,
43, 44, 45, 50, 52, 86, 101
tata ruang 7, 31, 61, 67, 68, 108,
135, 145, 146
teknologi xvi, xxi, xxii, 23, 25, 56,
67, 76, 81, 93, 106, 107, 109,
110, 111, 112, 113, 116,
117, 118, 128, 134, 162
transformasi digital 131
transformasi ekonomi xv, xvi,
xvii, 24, 25, 26, 82, 99
triangular 93

U

undang-undang ii, iv, v, 4, 30, 45,
52, 53, 122, 123, 124, 140,
142, 144, 146, 148, 150,
153, 158, 159
upaya 74, 75, 81, 89
urgensi v, xix, xx, 3, 24, 30, 74, 75

V

visi indonesia xv, 24

W

wilayah xvi, xix, xx, xxi, 2, 16, 17,
19, 20, 21, 22, 23, 25, 31, 32,
33, 36, 41, 45, 56, 59, 60, 61,
63, 64, 65, 69, 70, 76, 80, 81,
82, 93, 97, 98, 101, 113, 125,
126, 127, 128, 130, 132,
136, 147, 148, 152, 153,
166, 167

BIOGRAFI EDITOR



Fitra Arsil, Dr., S.H., M.H., lahir di Jakarta 28 Desember 1974. Bekerja sebagai staf pengajar di FHUI sejak tahun 2001. Sejak tahun 2014 menjabat sebagai Ketua Bidang Studi Hukum Tata Negara. Selain mengajar Fitra aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan kegiatan akademik lainnya seperti menulis berbagai artikel jurnal, menjadi narasumber dan ahli dalam berbagai forum, menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional dan jurnal internasional. Dalam karya-karyanya dan mata kuliah yang diasuhnya, Fitra Arsil memilih fokus penelitian kepada isu-isu sistem pemerintahan, lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, pemilu, peradilan konstitusi dan hukum tata negara darurat. Beberapa karya ilmiah penulis diantaranya: “The Idea of a Single Term of Office of the President and Vice President in Indonesia” (2022), “Challenges of Checks and Balances in Disaster Management in Indonesia” (2022), “Concept and Implementation on the State of Emergency in Indonesia” (2022), *The Disappearance of the ‘Legislative Model’: Indonesia Parliament’s Experience in Response to Covid-19*, *The Journal of Legislative Studies*, Routledge Taylor & Francis Group (2022), “Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020). *Parliamentary Affairs*, Oxford University (2021), “Understanding Natural Resources Clause in Indonesia Constitution” (2021), “The Urgency of Revision of The Law Regarding Conservation of Biological Natural Resources and Its Ecosystems in Indonesia”

(2021), “State Defense Rights in Indonesia’s Constitution” (2021), “Acceleration for Disasters: Evaluation of The Disaster Management Act in Indonesia (2021), “A Normative Analysis of the Limitation of Human Rights: Assessing the Constitutionality of Press Freedom in Indonesia” (2021), “Parlemen, Koalisi dan Instabilitas Sistem Presidensial: Kasus Presiden Collor De Mello Di Brazil” (2020), “Model Pengaturan Kedaruratan dan Pilihan Kedaruratan Indonesia Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19” (2020), dll. Penulis dapat dihubungi pada e-mail fitra.arsil@ui.ac.id.

BIOGRAFI PENULIS



Ariesy Tri Mauleny, Dr., M.E., Lahir di Palembang, 26 Maret 1975. Mengawali karir di Pusat Penelitian SETJEN DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik sejak tahun 2009. Saat ini telah berganti menjadi Analis Legislatif pasca lahirnya BRIN. Menyelesaikan Program Doktor Ilmu Ekonomi di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi (PPIE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) pada tahun 2019. Penulis aktif melakukan penelitian, analisis, ekspose dan pendampingan dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPR RI. Penulis mendampingi Pansus untuk RUU Ibu Kota Negara (2022), Komisi XI untuk RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (2021), dan Badan Legislasi (Baleg) untuk RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja (2020). Sebelumnya saat tubel S3, mendampingi Komisi XI untuk RUU PNPB (2016), BALEG untuk RUU Penjaminan (2015) serta Pansus RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (2014). Beberapa karya tulis ilmiah yang sudah dipublikasikan antara lain: *The Disappearance of the ‘Legislative Model’: Indonesia Parliament’s Experience in Response to Covid-19*, *The Journal of Legislative Studies*, Routledge Taylor & Francis Group (2022), “Law Making Activities during Lame Duck Sessions in Indonesia (1997-2020). *Parliamentary Affairs*, Oxford University (2021), Memajukan Industri Keuangan Syariah yang Berdaya Saing (2021), “*Public Participation and Implementation of the Representative Function of the Indonesian Parliament during the Enforcement of the Covid-19 Pandemic Emergency*” (2020),

Memajukan Logistik Indonesia yang Berdaya Saing (2020), Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia (2020). Redesain Pembangunan Ekonomi Kelautan Indonesia (2019), Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia (2018), Analisis Empiris Koperasi Indonesia (2018), Pemberdayaan UMKM dan Perekonomian Nasional: Perspektif Penjaminan (2017), Pemangkasan Anggaran 2016 dan Target Pertumbuhan Ekonomi (2016), Kebijakan PMN dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), serta Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan Jakarta (2015), dll. Penulis dapat dihubungi pada e-mail: ariesy.mauleny@dpr.go.id.



Hilma Meilani, ST.,MBA., Penulis menyelesaikan studi S1 Teknik Kimia di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, dan pendidikan S2 *Finance* di Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada. Penulis bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Analis Legislatif. Penulis pernah ditugaskan dalam asistensi pembahasan RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak, RUU Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, RUU Sistem Resi Gudang, dan RUU Minyak dan Gas Bumi, serta penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan antara lain: Perkembangan Penerimaan Pajak Daerah di Indonesia Tahun 2010-2019 (2021), Potensi, Perkembangan dan Strategi Wisata Halal Daerah (2020), dan Fasilitasi Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Digital dan *Technopreneur* (2019). Penulis dapat dihubungi melalui email: hilma.meilani@dpr.go.id.



Dewi Wuryandani, menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Keuangan Manajemen Ekonomi-Magister Ekonomi Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik. Saat ini bekerja sebagai analis Legislatif di Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR RI. Beberapa karya tulis yang telah dipublikasi “Lembaga Keuangan Mikro Dalam Menunjang Kemandirian Ekonomi Bangsa”, “Kebijakan Strategis Pengembangan UMKM Sebagai Penggerak Ekonomi Nasional”, “Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Daya Saing Melalui Perdagangan Internasional”, “Managerial Problems and Regulations Disharmony in Regional Owned Enterprises: Case Study of Indonesia Banking Sector”, “Scrutinizing Indonesia’s Agricultural Start-ups”, dan “Inovasi Startup Pertanian: Modernisasi Agribisnis Pangan”. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: dewi.wuryandani@gmail.com atau dewi.wuryandani@dpr.go.id



Lisnawati, S.Si., M.SE., lahir di Jakarta, 8 September 1982. Pendidikan S1 Sarjana Sains diselesaikan di FMIPA Universitas Indonesia pada tahun 2005. Pendidikan S2 Ilmu Ekonomi diselesaikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada Tahun 2008. Bekerja sebagai Peneliti bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI sejak tahun 2009. Kini Penulis telah beralih jabatan menjadi Analis Legislatif pasca lahirnya BRIN. Penulis pernah mendampingi Komisi XI untuk RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

(2021), Komisi VI untuk pembahasan RUU Perdagangan (2014) dan RUU Koperasi (2012) serta Komisi XI untuk pembahasan RUU *Tax Amnesty* (2016). Penulis juga telah menghasilkan beberapa karya ilmiah yang dimuat dalam bentuk Info Singkat, Jurnal, dan Bagian Buku, antara lain: Optimalisasi dan Penguatan Perpajakan Indonesia (2020), Kebijakan Pemberantasan *Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing* Di Indonesia (2019), Implementasi Sistem Keuangan Pusat dan Daerah dalam Mendukung Perekonomian Nasional (2015), Kebijakan Ketenagakerjaan (2014). Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok diantaranya dengan topik: Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021), Transportasi *Online* (2020), PAD (2016), Konektivitas (2015), dan Evaluasi Pembangunan Daerah (2014). Penulis dapat dihubungi melalui email: lisnawati.dpr@gmail.com.







Hadirnya buku dengan judul “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?” ini sangat tepat di tengah semakin berkembangnya diskusi mengenai pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Saya menilai buku ini menarik mengingat pembangunan dan pemindahan IKN Nusantara merupakan salah satu produk utama yang menjadi *output* bersama DPR dan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara.

Bahasan dalam buku ini memiliki alur cukup menarik, mulai dari diskursus konseptual mengenai urgensi pembangunan dan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, termasuk bagaimana sejarah pemindahan IKN yang telah berlangsung lama dengan alasan dan pertimbangannya. Selanjutnya dihadirkan benchmarking pemindahan IKN dari perspektif negara lain yaitu Brasil, Malaysia, Tanzania dan Korea Selatan termasuk skema pembiayaannya. Yang menarik juga terdapat pembahasan terkait bagaimana upaya yang dapat dibangun untuk menghadirkan IKN Nusantara sebagai pusat ekonomi baru yang menggeser Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris.

Disamping itu, buku ini juga melihat pentingnya memahami perjalanan penyusunan dan pembahasan RUU hingga menjadi UU dan kemudian diuji Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya bermuara pada catatan untuk dilakukan perbaikan regulasi dan penguatan implementasi yang diperlukan. Buku ini juga membahas upaya pendanaan dan pembiayaan dengan beragam skema inovatif yang disediakan pemerintah untuk memastikan iklim investasi mendapatkan fleksibilitasnya namun tetap akuntabilitas di tengah dinamika global yang terjadi. Bagaimana menghadirkan IKN Nusantara sebagai *smart city* dan *smart society*, di saat yang sama DKI Jakarta juga diharapkan tetap tumbuh dan semakin produktif, di tengah kondisi yang ada saat ini.



 publicabooks.ascasrya.or.id
 publicainstitute@gmail.com
 [publicainstitute_jakarta](https://www.instagram.com/publicainstitute_jakarta)
 Penerbit Publica Institute Jakarta

BUKU UMUM

ISBN 978-623-8232-05-5



9 786238 232055